MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 666/DJMT.1/ST.KP7.1/XII/2025

Menimbang : Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, maka perlu dilakukan Penyusunan Direktif Presiden di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Ditjen Badilmiltun Nomor 1566/DJMT.1/RA.1.7 /XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyusunan Direktif Presiden di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Teguh Ahmadi, S.E., M.M./ 198406262009041007, Pembina (IV/a), Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat;
2. Ira Farella Anggraini, S.E., M.M./ 198705112009042003, Pembina (IV/a), Kasubbag Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Sekretariat;
3. Sofiyatul Mu`Minah, M.Kom/ 199204012019032016, Penata Muda Tk. I (III/b), Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan;
4. Rahmawati Sukma Wardani, A.Md.Kb.N./ 20000306 2022012004, Pengatur (II/c), Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil;
5. Nurul Faizah, S.E./ 199604192020122013, Penata Muda Tingkat I (III/b), Operator - Penata Layanan Operasional;
6. Muhammad Hasan Nasution, S.E./ 19940824202506 1008, Penata Muda (III/a), Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;
7. Helmina Saragih, S.E./ 199404262025062003, Penata Muda (III/a), Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;
8. Rahmat Darmawan/ 198910272025211041, V, Operator Layanan Operasional.

Untuk : Melaksanakan Penyusunan Direktif Presiden di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 sd. 19 Desember 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SODIKIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.